

**PERAN PEMERINTAH DAN AKTOR LOKAL DALAM
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KE SENTRA IKAN DI
KELURAHAN KEDUNG COWEK SURABAYA**

SKRIPSI

Disusun Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)
dalam bidang Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Diana Permatasari

10020122038

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

2026

PERTANGGUNGJAWABKAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Permatasari
NIM : 10020122038
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dan Aktor Lokal Dalam
Penataan Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Ikan Di Kelurahan Kedung Cowek
Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 9 Juni 2026



Diana Permatasari

NIM: 10020122038

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Diana Permatasari

NIM : 10020122038

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul ***PERAN PEMERINTAH DAN AKTOR LOKAL DALAM
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KE SENTRA IKAN DI
KELURAHAN KEDUNG COWEK SURABAYA***, saya berpendapat
bahwa Skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu persyaratan bagi
yang bersangkutan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)
dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing


Ajeng Widya Prakasita, M.A.
NIP. 199502232020122025

PENGESAHAN

Skripsi oleh Diana Permatasari dengan judul "**Peran Pemerintah Dan Aktor Lokal Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Ikan Di Kelurahan Kedung Cowek Surabaya**" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal,
9 Juni 2026

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Ajeng Widya Prakasita, M.A.

NIP. 199502232020122025

Penguji II



Dr. Aniek Nurhayati, M. Si

NIP. 196909071994032001

Penguji III



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si

NIP. 197202062007101003

Penguji IV



Dr. Noor Rohman, M.A

NIP. 198510192015031001

Surabaya, 15 Juni 2026

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DIANA PERMATASARI
NIM : 10020122038
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU POLITIK
E-mail address : diana15permata@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DAN AKTOR LOKAL DALAM PENATAAN

PEDAGANG KAKI LIMA KE SENTRA IKAN DI KELURAHAN

KEDUNG COWEK SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juni 2026

Penulis

(DIANA PERMATASARI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Surabaya mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Ikan Bulak yang terletak di Kelurahan Kedung Cowek. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan mempelajari cara mereka berinteraksi saat menjalankan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data didapatkan melalui wawancara, pengamatan, dan pengumpulan dokumen dengan melibatkan pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, serta pihak-pihak lain yang mendukung.

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran sebagai pengatur, pembantu, dan penengah dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan cara yang persuasif dan mengakomodasi kebutuhan. Orang-orang yang terlibat dalam proses penataan terdiri dari Dinas Koperasi dan UKM, Satpol PP, kelurahan, pedagang kaki lima, masyarakat setempat, paguyuban pedagang, dan kelompok nelayan. Cara orang-orang berinteraksi menunjukkan adanya kerja sama, meskipun pemerintah masih menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih mengalami beberapa kendala, seperti turunnya pendapatan para pedagang, kurangnya promosi untuk Sentra Ikan Bulak, dan adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap pemindahan lokasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kedung Cowek sudah mencerminkan praktik pemerintahan kota yang melibatkan banyak pihak, tetapi pelaksanaannya masih lebih bersifat dari atas ke bawah.

Kata Kunci: peran pemerintah, pengelolaan kota, pedagang kaki lima, pelaku lokal, Sentra Ikan Bulak.

ABSTRACT

This study aims to analyze how the Surabaya City Government manages Street Vendors (PKL) at Sentra Ikan Bulak located in Kedung Cowek Village. In addition, this study also seeks to identify the actors involved and examine the interaction patterns among them in implementing the policy. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the government, street vendors, local communities, and other supporting actors.

The results of the study show that the Surabaya City Government acts as a regulator, facilitator, and mediator in the process of organizing Street Vendors (PKL) through persuasive and accommodative approaches. The actors involved in the arrangement process include the Department of Cooperatives and SMEs, Satpol PP, village authorities, street vendors, local communities, vendor associations, and fishermen groups. The interaction patterns among actors indicate a collaborative relationship, although the government remains the dominant actor in decision-making. In its implementation, the street vendor arrangement policy still faces several obstacles, such as declining vendor income, limited promotion of Sentra Ikan Bulak, and resistance from some vendors toward relocation. This study concludes that the arrangement of Street Vendors (PKL) in Kedung Cowek Village reflects the practice of urban governance involving multiple actors, although its implementation still tends to be top-down.

Keywords: government role, urban governance, street vendors, local actors, Sentra Ikan Bulak.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
MOTTO	2
ABSTRAK	2
BAB I	16
PENDAHULUAN	16
A. LATAR BELAKANG MASALAH	16
B. RUMUSAN MASALAH	21
C. TUJUAN PENELITIAN	21
D. MANFAAT PENELITIAN	22
1. Sisi Keilmuan Akademik	22
2. Sisi Praktis	23
E. DEFINISI OPERASIONAL	23
1. Urban Governance	23
2. Penataan Sektor Informal	23
3. Pedagang Kaki Lima (PKL)	24
4. Relokasi	25
5. Sentral Ikan Bulak	26
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	26
BAB II	28
KERANGKA TEORI DAN KONSEP	28
A. PENELITIAN TERDAHULU	28
B. TEORI DAN KONSEP	41
1. Urban Governance	41
C. KERANGKA PEMIKIRAN	45
1. Aktor dan Institusi (Actors and Institution)	46
2. Proses dan Mekanisme (Processes and Mechanisms)	47
3. Hasil dan Akuntabilitas (Outcomes and Accountability)	48

4. Indikator Keberhasilan Urban Governance dalam Penataan PKL	49
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A. JENIS PENELITIAN DAN PROBLEMA PENELITIAN	51
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	51
C. SUBJEK PENELITIAN	53
1. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	55
2. Unit dan Peringkat Analisis	54
3. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling	56
a. Situasi Sosial	56
4. Teknik Pengumpulan Data	57
b. Teknik Wawancara Mendalam	58
c. Teknik Studi Dokumentasi	59
E. Teknik Analisis Data	60
a. Kondensasi Data	60
b. Penyajian Data	60
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	61
F. Teknik Validasi Data	62
BAB IV	64
PEMBAHASAN	64
4.1. Gambaran Umum Sentra Ikan Kota Surabaya	64
4.1.1 Kondisi Wilayah Kelurahan Kedung Cowek	66
4.1.2 Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan	68
4.1.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan	73
4.2 Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Penataan Pedagang Kaki Lima	77
4.2.2 Bentuk Intervensi Pemerintah Kota	78
4.2.3 Strategi Pemerintah dalam Penataan PKL	84
4.2.4 Hambatan Pemerintah dalam Proses Penataan	87

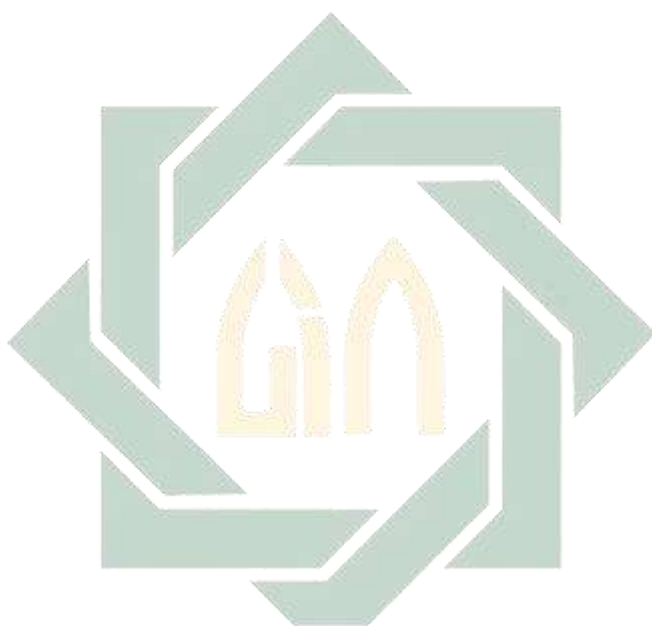
4.3 Aktor-Aktor dalam Proses Penataan Pedagang Kaki Lima	93
4.3.1 Pemerintah Kota Surabaya sebagai Aktor Utama	97
4.3.2 Pedagang Kaki Lima sebagai Aktor Ekonomi Informal	102
4.3.3 Masyarakat Lokal dalam Proses Penataan	106
4.4 Pola Interaksi Antar Aktor dalam Proses Penataan	107
4.4.1 Pola Komunikasi antara Pemerintah dan Pedagang	109
4.4.2 Bentuk Kerjasama dan Konflik Antar Aktor	112
4.4.3 Relasi Kekuasaan dalam Penataan PKL	114
4.4.4 Pola Adaptasi Pedagang terhadap Kebijakan Penataan	116
4.5 Analisis Penataan PKL dalam Perspektif Governance	120
4.5.1 Penataan PKL sebagai Bentuk Urban Governance	120
4.5.2 Dinamika Kepentingan dalam Penataan PKL	123
4.5.3 Model Interaksi Pemerintah dan PKL di Kedung Cowek	125
BAB V	129
PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN	138
LAMPIRAN 1. PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA	138
LAMPIRAN 2. PROFIL INFORMAN PENELITIAN	146

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	46
Tabel 4.1 Bentuk Intervensi Pemerintah Kota Surabaya dalam Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek dan Pantai Kenjeran.....	66
Tabel 4.2 Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek dan Pantai Kenjeran.....	70
Tabel 4.3 Analisis Aktor dan Mekanisme Kebijakan dalam Program Penataan PKL di SIB.....	76
Tabel 4.4 Pemetaan Peran Aktor Pemerintah Kota Surabaya dalam Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek.....	78
Tabel 4.5 Profil dan Dinamika PKL sebagai Aktor Ekonomi Informal di Kawasan Kedung Cowek dan Pantai Kenjeran.....	81
Tabel 4.6 Respons dan Dampak terhadap Masyarakat Lokal dalam Proses Penataan PKL di Kedung Cowek.....	83
Tabel 4.8 Pola Komunikasi antara Pemerintah dan Pedagang dalam Proses Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek.....	85
Tabel 4.10 Analisis Relasi Kekuasaan dalam Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek dan Pantai Kenjeran.....	88
Tabel 4.11 Pola Adaptasi Pedagang terhadap Kebijakan Penataan PKL di Kawasan Kedung Cowek.....	91
Tabel 4.12 Perbandingan Dimensi Governance dan Government dalam Penataan PKL di Kedung Cowek.....	93
Tabel 4.14 Model Interaksi Pemerintah dan PKL dalam Program Penataan di Kawasan Kedung Cowek.....	97
Tabel L.1 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara – Dinas Koperasi dan UKM...	109
Tabel L.2 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara – Kelurahan Kedung Cowek..	112
Tabel L.3 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara – Satpol PP Kecamatan Bulak	114
Tabel L.4 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara – PKL yang Bertahan di SIB..	116
Tabel L.5 Profil Informan Penelitian.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampak depan Sentra Ikan Bulak.....	57
Gambar 1.2 Tampak dalam Sentra Ikan Bulak.....	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan. (2006). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2022). *Kecamatan Bulak dalam Angka 2022*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2024). *Kota Surabaya dalam Angka 2024*. Diakses dari <https://surabayakota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/38c76de6074beea6951be69e/kota-surabaya-dalam-angka-2024.html>

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Cahyadi, Eri. (2021). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik Kota Surabaya*, 3(1), 12.

Cipto, Bambang. (2012). *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Kajian Politik dan Kebijakan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya. (2022). *Laporan Tahunan Sentral Ikan Bulak 2022*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.

Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Firdaus, Haris. (2019). Strategi Pemberdayaan PKL melalui Relokasi ke Pasar Modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, 4(1), 45.

Fitriani, L., & Achmad, Z. A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan PKL: Studi di Kota Makassar. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Publik*, 3(1), 45–62.

Foucault, Michel. (1997). *Disiplin dan Hukum: Kelahiran Penjara* (terj. Petrus Sunu Hardiyanta). Yogyakarta: LKiS.

Handoyo, E., & Machdum, Z. (2018). Dilema Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 112–125.

Haryono, Setyo. (2007). Ekonomi Informal Perkotaan dan Kebijakan Relokasi PKL. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(3), 155–162.

Hidayah, Nurul. (2019). Paguyuban PKL sebagai Modal Sosial dalam Negosiasi Kebijakan Relokasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(1), 48.

Hidayat, A., & Purnomo, E. P. (2020). Multi-Stakeholder Interests dalam Penataan Ruang Publik Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 89–104.

Hidayat, R., & Pratiwi, M. (2020). Peran Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Komparatif Surabaya dan Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156–172.

Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). *Panduan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

Kumorotomo, Wahyudi. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kusuma, A. W., & Prabowo, H. (2023). Community-Based Spatial Planning: Alternatif Model Penataan Sektor Informal di Kota-Kota Indonesia. *Journal of Urban and Regional Planning*, 9(1), 112–129.

Kusumawati, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 245–262.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.

Miftah Thoha. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhtar, S. (2024). *PKL Bermartabat dan Ekonomi Kerakyatan*. CV. Azka Pustaka.

Nugroho, A. C., & Setiawan, R. (2022). Konflik Pemanfaatan Ruang Publik: Relasi Pedagang Kaki Lima dan Pemerintah Kota di Solo. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 289–305.

Nugroho, A. C., & Sutrisno, E. (2020). Ambivalensi Kebijakan Sektor Informal di Perkotaan Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 23–38.

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurhasanah, S., & Aziz, A. (2022). Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima terhadap Pendapatan: Studi di Sentra PKL Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 178–195.

Nurjannah, S., & Kushandajani. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4), 251–260.

Octaviani, S. L. (2023). Strategi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Pola Aktivitas dan Komunikasi di Jalan Marakash Square–Jalan Candrabaga–Jalan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi (Skripsi). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pierre, J. (2011). The Politics of Urban Governance. Dalam J. Pierre (Ed.), *The Oxford Handbook of Urban Politics* (hlm. 3–18). Oxford: Oxford University Press.

Purwanto. (2017). Tata Kelola Sektor Informal Perkotaan: Studi Kasus PKL Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3), 214.

Puspitasari, Ratna. (2021). Dampak Relokasi PKL terhadap Pendapatan Pedagang: Studi di Kawasan Pantai Kenjeran Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 10(1), 89.

Putri, A. D., & Setiawan, B. (2021). Collaborative Governance dalam Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus Pasar Minggu Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 89–104.

Rahman, F., & Mulyadi, D. (2022). Strategi Adaptasi Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi: Studi Etnografi di Sentra Kuliner Kota Surabaya. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 14(1), 78–94.

Rahmawati, D., & Suryono, B. (2019). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 7(1), 45–58.

Rismaharini, Tri. (2013). Tata Kelola Kota Surabaya: Pengalaman dan Pelajaran. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 5(2), 67.

Salim, Agus. (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Saputra, D. A., & Widianingsih, I. (2021). Politik Ruang dan Resistensi Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 234–251.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suprijanto, E., & Wirawan, D. (2020). Peran Sektor Informal dalam Perekonomian Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1).

Suprijanto, I., & Wirawan, A. (2018). Evaluasi Kepuasan Pedagang Kaki Lima terhadap Lokasi Relokasi di Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 78–93.

Susanti, R., & Wijaya, H. B. (2021). Transformasi Paradigma Penataan PKL: Dari Represif Menuju Pemberdayaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 134–149.

Suwitri, Sri. (2006). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Dalam Riant Nugroho (Ed.), *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Usman, Sunyoto. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibowo, A. S., & Mariana, D. (2020). Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Program Relokasi di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 67–82.

Widayati, Wiwik. (2017). Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(2), 78.

Wijaya, K., & Santoso, E. B. (2021). Evaluasi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima: Perspektif Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial di Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), 145–152.

Winarno, B., & Setyawan, D. (2019). Faktor-Faktor Keberhasilan Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 30(3), 201–216.

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

Wulandari, S., & Kushandajani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(4), 251–260.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A